

Yogya Post, 7 Mei 1990

Aspek Komunikasi dalam Penerapan Hukuman

Oleh Faturochman*

Ditinjau dari psikologi lingkungan sebagian besar lembaga pemasyarakatan kurang fungsional. Bangunannya dibuat sedemikian rupa sehingga terisolir dengan lingkungannya. Inilah masalahnya. Narapidana yang terbiasa hidup dalam lingkup yang terbatas akan sulit menyesuaikan kembali ketika mereka bebas. Tidak biasa melihat dan *bergaul* dengan kehidupan layak secara psikologis sangat menyiksa ketika harus kembali terlibat di dalamnya, terutama bagi yang menjalani hukuman cukup lama. Jangan heran bila kemudian mereka pun merasa kangen dengan suasana penjara yang sudah beberapa waktu terpaksa menyatu dengannya. Bawah sadar lantas berfungsi. Untuk bisa kembali seperti kehidupan sebelumnya, masuk bui, maka kejahatan bisa mengantar ke sana.

Itulah salah satu analisis tentang penjahat kambuhan. Masalahnya memang disederhanakan. Namun masalah lama tentang model pemberian hukuman seperti yang sekarang, masih relevan untuk dipertanyakan lagi. Pencampuran narapidana yang tindak kejahatannya berbeda, pelatihan kerja yang ala kadarnya, atau terlalu nyamannya kondisi di penjara masih perlu terus dikaji. Apalagi tindak kejahatan ada tendensi meningkat lagi akhir-akhir ini.

Ada benarnya pendapat yang menyatakan hukuman merupakan salah satu cara untuk mendidik. Tapi tampaknya bukan cara yang baik bila tidak bisa disebut sebagai cara terjelek. Disinilah kemudian muncul masalah keadilan. Hukuman akan mendidik bila berpijak pada keadilan. Itu pun sering tidak cukup. Masih ada hal lain yang perlu dilibatkan sebagai bahan pertimbangan yaitu kebijakan. Ambillah contoh perkara pencurian. Mencuri dan mencuri ternyata bisa berbeda. Mencuri televisi tentu saja tidak sama dengan mencuri ayam, apalagi bila dibandingkan dengan mencuri uang negara ratusan juta. Bagaimana hukumannya? Ternyata sering terjadi usaha yang terlalu *mendidik* dan *bijak*. Mencuri ayam perlu dihukum berat agar tidak mengulangi, apalagi dalam jumlah yang besar. Sedangkan korupsi diberi keringanan mengingat jasa-jasanya. Itulah keadilan yang sedang berlaku.

Reaksi

Setiap kali PSSI menjatuhkan hukuman muncul reaksi pro dan kontra. Kita jadi bertanya-tanya, tidak pernahkah lembaga yang satu ini menetapkan hukuman secara adil? Atau karena bukan pengadilan maka putusannya tidak dianggap legal.

Kasus terakhir tentang pemberian hukuman kepada pemain PSM cukup jelas menggambarkan hal itu. Reaksi terbesar yang muncul tidak adil. Dibanding dengan kasus suap di PSMS hukuman pada pemain PSM dinilai lebih berat. Padahal pelanggaran lebih ringan. Menurut saksi beberapa penonton yang mulai kericuhan adalah pemain Persib, mengapa mereka tidak juga ikut dipersalahkan.

Tentang kredibilitas persepakbolaan juga mewarnai penilaian pemberian hukuman oleh PSSI. Kurang meyakinkan prestasi sepak bola kita, meskipun bukan tanggung jawab PSSI semata, pada akhirnya memang ditimpakan kesana. Belum lagi gencarnya kabar kekotoran orang-orang yang aktif di sepak bola (bukan PSSI) juga ikut mengurangi kredibilitas tadi. Hal ini pun dianggap tanggung jawab organisasi sepak bola.

Kesimpulannya memberi hukuman agar efektif memang butuh **wibawa**. Sayangnya wibawa yang banyak dimiliki terlalu banyak bertumpu pada legitimasi, keabsahan memberi hukuman. Secara struktural dan untuk jangka panjang keadaan seperti ini tidak bisa bertahan untuk menegakkan hukum.

Keluarga

Ada seorang yang menyatakan bahwa penggunaan hukuman dalam keluarga justru akan membawa pada keberhasilan di kelak kemudian hari. Dia mengambil contoh dirinya sendiri. Di waktu kecil kalau tugas hariannya tidak dikerjakan maka ia tidak akan dapat jatah makan. Peraturan itu membuat ia **disiplin**. Disiplin itu kemudian terbawa terus hingga ia banyak memetik keberhasilan. Dalam rangka membina anak-anaknya dan juga anak buahnya diterapkanlah program pemberian hukuman itu.

Dia gagal. Sayang dia tidak tahu mengapa mengalami kegagalan seperti yang diceritakan. Anaknya malah sering melawan dan anak buahnya lebih banyak yang apatis menghadapi model kepemimpinan yang diterapkan.

Rupanya ada perbedaan yang jelas antara penerapan hukuman yang dilakukan si bapak yang sekarang ini dengan orang tuanya dulu. Ketika dia masih kecil peraturan yang diterapkan orang tua sangat jelas. Semua yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan diketahui secara pasti. Demikian juga sanksi yang harus diterima bila melakukan pelanggaran.

Dalam mengkomunikasikan peraturan itu juga ada tahapannya. Batas kemampuan anak dalam menerima informasi sangat diperhatikan sehingga tidak ada anggapan anak sama dengan orangtua. Anak-anak yang dibawah umur tidak perlu dijejali dengan peraturan yang kompleks. Singkatnya, anak tahu apa maksud orang tua karena diberitahu dengan jalan yang pas.

Yang tidak dipelajari oleh bapak ini adalah cara memberitahu pada anak. Terlalu banyak larangan bagi si anak tanpa sempat memikirkan maksud di belakang peraturan. Dia juga tidak dibantu memahami masalah. Kepada para anak buahnya juga tidak banyak komunikasi selain dalam hubungan yang formal. Keterbatasan pengetahuannya pada masalah pribadi bawahan tidak segera diatasi. Kaku itulah salah satu karakter yang menonjol.

Kesimpulannya, **komunikasi** sangat penting dalam penerapan hukuman. Seperti lazimnya komunikasi yang penting dibaliknya adalah **informasi**. Dan informasi adalah suatu kekuatan tersendiri. Kekuatan tidak terbatas dengan legitimasi dan koersi (hukuman) tetapi juga pada informasi itu sendiri.

Menyiksa

Salah satu kelemahan hukuman adalah sifatnya yang kurang asosiatif dengan perilaku yang dimaksud. Hukuman sebagai konsekuensi perilaku melanggar atau yang dianggap melanggar bagi penerima hukuman sering dianggap sebagai akibat ketidaksukaan penghukum pada terdakwa. Dengan kata lain hukuman yang ditujukan untuk menghentikan perilaku diterjemahkan sebagai cara untuk menyiksa pelaku yang melanggar.

Tidak mudah memang menerapkan hukuman agar pas. Anehnya banyak orang yang menyukai penggunaan hukuman untuk merealisasikan berbagai maksud. Kekurang-sabaran menerapkan metode lain sering bermuara pada penggunaan hukuman itu. Yang demikian masih lumayan sebab penggunaan hukuman adalah sebagai jalan terakhir. Akan lebih gawat lagi apabila

kecenderungan menghukum makin menjadi mode. Dianggapnya hukum sebagai jalan paling baik, paling efektif, efisien, dan paling-paling yang lain.

Kecenderungan seperti itu mungkin belum sampai patologis. Tetapi melihat gejalanya dalam kehidupan sehari-hari makin banyak. Yang mengerikan adalah bila kemudian digeneralisir bahwa semua bisa diselesaikan dengan hukuman. Padahal salah satu sifat penggunaan hukuman adalah kecanduan dalam penerapan bila pernah berhasil.

Ketika kebanyakan orang suka menggunakannya, maka dunia akan menjadi kembali seperti rimba. Saling berlomba menggunakan. Saling berusaha mengungguli. Dalam suasana rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Mereka yang kalah tidak hanya harus tunduk, tetapi juga harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari proses mencari menang.

Dalam konteks realitas kehidupan, kaum lemah yang tidak banyak memiliki kekuatan legitimasi harus banyak menerima kenyataan bahwa kehidupan hanya sedikit yang berada di pihaknya. Dengan dalih hukum mereka sering terpaksa menyingkir. Tak tahu kemana harus mengadu.

Pengaduan terakhir adalah kepada Yang Maha Tinggi. Sementara menanti pada peradilan yang seadil-adilnya itu, menghindari hukuman adalah jalan yang paling aman. Bukan mematuhi. Dengan begitu deretan pelanggar makin panjang. Bedanya yang terakhir ini adalah para korban pelanggar yang terdahulu.

Sementara kemakmuran bisa dicapai dengan banyaknya prestasi pembangunan, ternyata keadilan masih merupakan suatu jauh dari jangkauan.

**Faturachman, dosen di Fakultas Psikologi dan peneliti di Puslit Kependudukan UGM*